



Jurnal Ilmu Administrasi **KEBIJAKAN**

ANALISIS ASPEK-ASPEK, IMPLIKASI DAN PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN REKOMENDASI PERIJINAN REHABILITASI PASAR BANJARANKABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Asep Kusdima Jauhari

ANALISIS KEMAMPUAN KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

H. Kamal Alamsyah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN DALAM MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

(Studi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa barat)

Iwan Satibi

PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SUBANG

Soleh Suryadi

ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Benyamin Harits

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SOSIAL DEMOKRATIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN LOKAL

Yaya Mulyana

ANALISIS HUBUNGAN PENILAIAN KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG

Lia Muliawaty

PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF (*COOPERATIVE LEARNING*) SISTEM STAD PADA MATA PELAJARAN IPS

Via Wuviani

PEGAWAI PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

Thomas Bustomi

PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

KEBIJAKAN JURNAL ILMU ADMINISTRASI

Jurnal Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Pasundan terbit dua kali setahun setiap bulan Januari dan bulan Juli. Jurnal Ilmu Administrasi "Kebijakan" berperan sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah administrasi, kebijakan publik, dan kebijakan bisnis. Jurnal ini memuat artikel hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, serta pembahasan kepustakaan, baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun asing.

Pimpinan Umum/Penanggungjawab

Benyamin Harits

Ketua Penyunting

Bambang Heru

Penyunting Pelaksana

Sudardja Adiwikarta, Kamal Alamsyah, Djaja Saefullah
Soleh Suryadi, Tjahjo Sutisnawidjaja
Thomas Bustomi, Uyat Suyatna

Alamat Redaksi:

Program Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Pasundan
Jl. Sumatra No. 41, Tlp. (022) 44221652 Fax. (022) 44221652 Bandung 40116
Bank Mandiri Jl. R.E. Martadinata No. 103 Tlp. (022) 4209091 Fax. (022) 4204991 Bandung
No. Rekening 1310004414688

Dicetak oleh

Sarwayasa *print & art*
e-mail: sarwayasa.yayan@yahoo.co.id
Jamika HP. 0818221189 Bandung 40221
(isi di luar tanggung jawab percetakan)

DAFTAR JUDUL DAN PENULIS

ANALISIS ASPEK-ASPEK, IMPLIKASI DAN PENANGANAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK PENERBITAN REKOMENDASI PERIJINAN REHABILITASI PASAR BANJARANKABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Asep Kusdiman Jauhari	1 – 14
ANALISIS KEMAMPUAN KERJA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR H. Kamal Alamsyah	15 – 30
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN OLEH BUPATI KEPADA CAMAT SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN DALAM MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK <i>(Studi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa barat)</i> Iwan Satibi	31 – 46
PENGARUH DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DINAS TATA RUANG PERMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SUBANG Soleh Suryadi	47 – 63
ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT Benyamin Harits	64 – 77
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SOSIAL DEMOKRATIS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN LOKAL Yaya Mulyana	78 – 100
ANALISIS HUBUNGAN PENILAIAN KINERJA DENGAN EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG Lia Muliawaty	101 – 114
PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL KOOPERATIF (<i>COOPERATIVE LEARNING</i>) SISTEM STAD PADA MATA PELAJARAN IPS Via Wuviani	115 – 128
PEGAWAI PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT Thomas Bustomi	129 - 157

ANALISIS PENGARUH PROFESIONALISME BIROKRASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BIDANG BINA PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

Benyamin Harits

ABSTRACT

This research based on main problem that is the low Employee Performance at Field of Health Care Department of Health West Java Province. This condition is predicted because of has not implemented yet of Bureaucratic Profesionalism aspects. The approach in this research about Bureaucratic Profesionalism and Employee Performance from public policy and public administration as master theory to develop science area of public administration. Research method is explanatory survey. This research use quantitative analysis usage Path Analysis Method meant to know value of influence Bureaucratic Profesionalism variable to Employee Performance at Field of Health Care Department of Health West Java Province, either through simultan and also by parsial. Result of research indicate that by simultan, Bureaucratic Profesionalism aspects (X) have an effect significance to Employee Performance (Y) equal to 47,48%. As for influence of other variable (ϵ) to Employee Performance (Y) equal to 52,52%. The conclusion of this research is Bureaucratic Profesionalism aspects influential significantly to Employee Performance at Field of Health Care Department of Health West Java Province. Conclusions of this research are that accross the board Bureaucratic Profesionalism aspects has been executed and implemented according to Employee Performance factors.

Keywords: *public administration, bureaucratic profesionalism, employee performance.*

1. Latar Belakang Penelitian

Citra mengenai buruknya pelayanan publik telah menjadi 'anekdot' di dalam masyarakat, karena pelayanan yang diberikan sangat tidak memuaskan dan cenderung rumit. Persepsi tersebut muncul, karena para pegawai pada sektor publik bekerja dalam kerangka institusi dan hukum yang kaku dapat menghala-angi efisiensi dan kemampuan merespon tuntutan publik, sehingga birokrasi publik bersikap terlalu formal dan bergantung pada peraturan tertulis.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap citra dari birokrat, yaitu sering berbuat salah dalam mengambil keputusan dan melemparkan tanggungjawab kepada orang lain serta bersembunyi dibalik keputusan-keputusan yang tidak jelas dengan menggunakan bahasa yang berbelit-belit. Dalam mengambil keputusan manajer publik seharusnya dapat membuka diri untuk menerima kritik dari otoritas internal maupun publik, sehingga rasa khawatir untuk mengambil keputusan bukan merupakan bagian dari budaya sektor publik yang

sering menjadi opini negatif. Salah satu upaya untuk mengatasi citra buruk sektor publik tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada sektor publik dengan cara melakukan peningkatan profesionalisme birokrasi.

Aparatur yang dibutuhkan saat ini, aparatur yang memiliki karakteristik kerja yang unggul, mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk mengembangkan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri menuju profesionalisme birokrasi yang handal dan terpercaya. Berkaitan dengan profesionalisme birokrasi Harits (2006:6) menyatakan bahwa: "Profesionalisme birokrasi yang andal dimaksud aparatur atau pegawai yang bekerja pada setiap unit pelayanan pemerintahan dalam berbagai level, memiliki keahlian dan keterampilan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tertentu dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki tanggungjawab moral atau etika profesi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan lingkungannya sebagai bagian dari kewajiban kebijakannya".

Pemahaman di atas menunjukkan bahwa birokrasi publik yang andal mempunyai daya kritis, tepat dan cepat dalam menangani pekerjaan serta berorientasi pada aturan yang dipakai dalam menangani berbagai masalah dengan menempatkan orang-orang sesuai dengan keahlian, sehingga setiap posisi penting dipegang oleh orang-orang yang menganut faham profesionalisme yang berbasis pada kinerja individu, kelompok dan

organisasi untuk menciptakan kinerja pegawai secara keseluruhan.

Kinerja pegawai dimaksud berkaitan dengan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai, baik secara perorangan maupun organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan tidak melanggar hukum sesuai dengan aturan moral dan etika organisasi. Pemahaman kinerja menurut Mangkunegara (2004:67) dijelaskan bahwa: "Kinerja pegawai merupakan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya". Dengan demikian, kinerja pegawai berkaitan dengan hasil kerja pegawai terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keberhasilan kinerja pegawai ini, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pegawai pada setiap unit kerja organisasi termasuk pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 tahun 2009 mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, antara lain: (1) penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan kesehatan, (2) penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelayanan kesehatan dan (3) penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan.

Merujuk tugas pokok dan fungsi di atas, terlihat bahwa tugas yang diemban oleh Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan segala permasalahan yang dihadapinya mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Proses pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi akan semakin lancar, apabila kinerja pegawai berjalan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Kinerja pegawai yang kurang menunjang atau kurang tepat akan menghambat pencapaian pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan. Dalam kenyataannya kinerja pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tidak berjalan sesuai dengan aturan yang menyebabkan tidak lancarnya pelaksanaan kerja secara memadai.

Berdasarkan hasil penelitian awal, ditemukan masalah kinerja pegawai rendah pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut:

1. Kualitas kerja pegawai rendah. Contohnya: pada Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Khusus dalam pelaksanaan penyusunan program kerja pelayanan kesehatan dasar dan khusus tidak sesuai dengan Juklak dan Juknis, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaiannya. Program kerja pelayanan kesehatan dasar dan khusus seharusnya selesai di bulan Februari setiap tahunnya, kenyataannya baru selesai di bulan Maret hingga April, keterlambatan ini disebabkan karena

ketepatan, ketelitian dan mutu kerja pegawai masih rendah.

2. Keandalan kerja masih rendah. Contohnya: pada Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dalam melaksanakan pengelolaan data program kesehatan keluarga dan gizi sarana kesehatan dasar tidak sesuai aturan yang ada, pegawai tidak terampil dalam mengelola data program kesehatan keluarga dan gizi yang seharusnya disimpan dalam 1 file, kenyataannya disimpan dalam 3 file, sehingga data pengelolaan sering tercecer.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mengemukakan pernyataan masalah (*Problem Statement*), yaitu rendahnya Kinerja Pegawai yang diduga disebabkan oleh belum dilaksanakannya Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi secara penuh. Selanjutnya berdasarkan pernyataan masalah tersebut dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat?
- 2) Berapa besar pengaruh Profesionalisme Birokrasi yang ditentukan Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi: Aspek Pengetahuan; Aspek Keterampilan dan Aspek Ketaatan Kode Etik terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

3.1. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis besarnya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
2. Mengembangkan Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi dan Faktor-faktor Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
3. Menerapkan secara teoritis Profesionalisme Birokrasi dalam memecahkan Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

3.2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini dapat mengembangkan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Kebijakan Publik yang berkaitan dengan Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai.
- 2) Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

4. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang akan diuraikan pada bagian ini difokuskan dalam menentukan tujuan dan arah penelitian serta untuk memilih referensi yang relevan dan spesifik dengan variabel yang akan diteliti. Dalam konteks ini, peneliti akan mencoba menyusun konsep dari teori-teori yang telah ada sebagai basis pemikiran untuk menjelaskan struktur hubungan antara aspek-aspek yang terlibat dalam

kontelasi masalah Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai.

Sobandi (2002:64) mengemukakan konsep profesionalisme sebagai: "suatu tingkah laku, atau suatu tujuan atau rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi". Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa profesionalisme merupakan tingkah laku yang disertai kualitas keahlian dari seseorang yang menyandang profesi tertentu. Adapun profesionalisme birokrasi dikemukakan Siagian (2000:163) sebagai berikut: "Profesionalisme birokrasi adalah keandalan pegawai dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh para klientele"

Pernyataan di atas, menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang disertai dengan kualitas, ketepatan dan kecermatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Menurut Martin dan Schinzinger terjemahan Widodo (1994: 192) mengemukakan aspek-aspek profesionalisme birokrasi sebagai berikut:

- 1) Aspek Pengetahuan, berkaitan dengan pemahaman dan penguasaan secara baik dan jelas mengenai peraturan pelayanan, pemahaman bidang kerja dan kemampuan memberikan penjelasan.
- 2) Aspek Keterampilan, berkaitan dengan kehandalan menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem operasional dan prosedur serta memahami kebutuhan atau keinginan publik.

3) Aspek Ketaatan Kode Etik, berkaitan dengan rasa tanggungjawab dan penampilan perilaku administrator untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat kepada kode etik, sikap dan perilaku melayani dan selalu menjaga citra organisasi.

Berdasarkan aspek-aspek profesionalisme birokrasi di atas, dapat dinyatakan bahwa setiap aparatur birokrasi dalam menjalankan tugasnya harus profesional yang memiliki aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek kode etik yang dapat memberi pengaruh terhadap kinerja pegawai. Adapun pemahaman kinerja pegawai, antara lain dikemukakan Mangkunegara (2004:75) bahwa: "Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya".

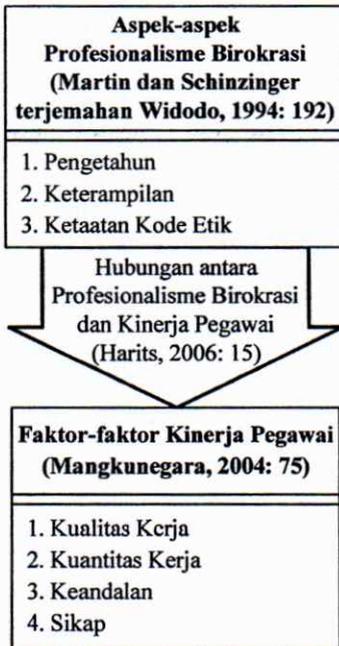
Pengertian di atas dapat dipahami bahwa kinerja pegawai merupakan penampilan kerja atau hasil kerja dari seorang atau sekelompok orang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya atau unjuk kerja secara optimal sebagai suatu proses pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Lebih lanjut Mangkunegara (2004:75) menyatakan 4 (empat) faktor Kinerja Pegawai yang menjadi standar penilaian hasil kerja sebagai berikut:

- 1) Kualitas Kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan dan kebersihan.
- 2) Kuantitas Kerja meliputi *output* rutin dan non rutin atau ekstra.
- 3) Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan, yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan,

inisiatif, kehati-hatian serta kerajinan.

- 4) Sikap yang meliputi sikap pegawai lain, pekerjaan serta kerjasama terhadap organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dinyatakan bahwa faktor-faktor kinerja pegawai itu berkaitan dengan kualitas, kuantitas, keandalan dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Setelah dijelaskan kerangka berpikir variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai menurut ahli, selanjutnya dikemukakan keterkaitan antara kedua variabel yang dikemukakan oleh Harits (2006: 15) sebagai berikut: "untuk meningkatkan kinerja pegawai yang efektif perlu dibangun profesionalisme birokrasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan dan memiliki sikap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati". Pandangan di atas, tampak bahwa kinerja organisasi yang efektif akan tercipta dengan adanya profesionalisme birokrasi yang memiliki keterampilan, kecakapan dan memiliki sikap konsisten di dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Untuk melihat hubungan keterkaitan variabel Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1
Paradigma Berpikir tentang
Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja
Pegawai

5. Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka berpikir di atas, penulis mengajukan hipotesis utama sebagai berikut:

1. Besarnya Profesionalisme Birokrasi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
2. Besarnya Profesionalisme Birokrasi yang ditentukan oleh: Aspek Pengetahuan; Aspek Keterampilan dan Aspek Ketaatan Kode Etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory survey*. Populasi dalam penelitian ini Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah responden 53 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu: (1) Studi kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan; (2) Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan lapangan terhadap obyek penelitian; (3) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya-jawab dengan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat; (4) Angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan yang bersifat tertutup.

Sebelum angket digunakan dalam pengumpulan data, maka terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya terhadap alat ukur (angket) penelitian yang akan dipergunakan. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor untuk setiap item dengan skor total melalui rumus *korelasi Person*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumusan *koefisien alfa cronbach*. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *path analysis*.

7. Hasil Penelitian

Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan setiap angket telah menunjukkan validitas dan reliabilitas yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan

nilai r atau nilai korelasi antara skors item dengan totalnya menunjukkan koefisien yang signifikan dan mempunyai nilai reliabilitas yang reliabel. Hasil perhitungan *path analysis* meliputi penetapan pengaruh langsung (simultan) dan tidak langsung (parsial) dikemukakan sebagai berikut:

1) Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y

Statistik uji yang digunakan adalah Statistik *F-Snedechor* dengan tahapan pengujian secara bersama yang langkahnya dilakukan sebagai berikut:

a) Pernyataan hipotesis statistik yang akan diuji

$$H_0 : \rho_{YX_1} = \rho_{YX_2} \dots \rho_{YX_i} = 0$$

$$H_A : \rho_{YX_i} \neq 0$$

b) Statistik Uji F digunakan untuk mengukur pengaruh secara keseluruhan dan hasilnya adalah:

$$F = \frac{53 - 3 - 1}{3 \times (1 - 0,456)} 0,456 = 13,69$$

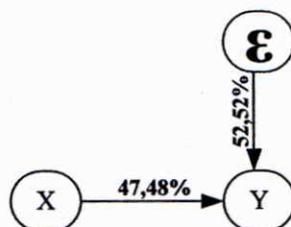
c) Kriteria pengujian

Tolak H_0 jika F hitung $>$ F tabel. Nilai F tabel diperoleh dari tabel distribusi F , dengan $dk = 3$ dan 50 , dengan araf kekeliruan = 5% maka nilai F tabel = $2,76$.

d) Keputusan

Nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka **hipotesis nol ditolak (signifikan)**, yang berarti bahwa sedikitnya ada satu koefisien jalur yang berpengaruh secara signifikan.

Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y sebesar $47,48\%$, sementara Pengaruh Langsung Variabel Lain (ϵ) terhadap Y sebesar $52,52\%$, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2

Pengaruh Langsung Variabel X terhadap Y

2) Pengaruh Tidak Langsung Variabel X_1 sampai X_3 terhadap Variabel Y

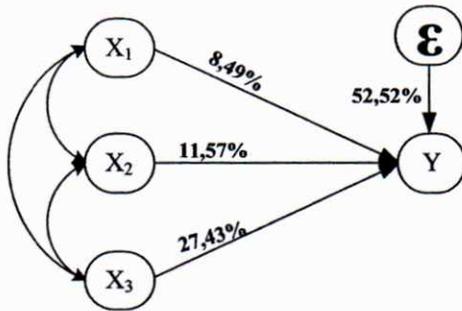
Pengujian secara individual dilakukan dengan menggunakan statistik *t-student*. Kesimpulan Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel X_1 sampai dengan X_3 sebagai Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi terhadap variabel Y Kinerja Pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Uji Variabel Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai

Dimensi Profesionalisme Birokrasi (Xi)	t hitung	t tabel	Kesimpulan	Ket.
X_1	1,11 3	1,64 5	HO Diterima	Tidak Signifikan
X_2	2,66 4	1,64 5	HO Ditolak	Signifikan
X_3	3,02 3	1,64 5	HO Ditolak	Signifikan

Sumber: Data Hasil Analisis, 2013.

Pengaruh tidak langsung variabel X_1 terhadap Y sebesar $-3,68\%$, pengaruh tidak langsung variabel X_2 terhadap Y sebesar $13,79\%$, pengaruh tidak langsung variabel X_3 terhadap Y sebesar $8,12\%$, pengaruh tidak langsung variabel X_4 terhadap Y sebesar $22,88\%$, sementara pengaruh variabel lain (ϵ) terhadap Y sebesar $58,89\%$.



Gambar 3

Pengaruh Tidak Langsung Variabel X₁ sampai dengan X₃ terhadap Y

8. Pembahasan

Pembahasan pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai dimaksud untuk mengungkapkan dan menjelaskan serta menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di samping itu dibahas pula hasil pengujian hipotesis dengan mengungkapkan temuan-temuan hasil penelitian, baik pembahasan secara langsung (simultan) maupun pembahasan secara tidak langsung (parsial) pada paragraf berikut ini.

1) Pembahasan Pengaruh Simultan Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai 47,48%, artinya pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai ini menunjukkan pengaruh yang positif. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Profesionalisme Birokrasi telah dilaksanakan Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Dalam hal ini pimpinan telah melaksanakan Profesionalisme Birokrasi yang menjadi andalan pegawai dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas tersebut terlaksana dengan mutu yang tinggi waktu yang tepat sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami. Dengan demikian variabel Profesionalisme Birokrasi telah mengubah pola berpikir dan tindakan yang cukup positif dari para pegawai bagi peningkatan Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah menerapkan profesionalisme birokrasi kepada bawahannya sebagai fasilitas yang dapat mengubah pola berpikir pegawai, yaitu dari pola berpikir tradisional ke pola berpikir rasional dan global dengan lebih transparansional dan memegang teguh aturan dan prosedur kerja yang berlaku di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Hasil penelitian telah menunjukkan tingkat perubahan pola pikir dan tindakan, di mana para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Visi dan misi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, yaitu adanya kemampuan para pegawai dalam memberikan makna yang dalam dan kuat tentang fokus yang akan dikerjakan berkaitan dengan kualitas dan mutu kerja di mana seluruh masyarakat tahu dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan

akibat penyakit, bencana dan perilaku yang buruk serta mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatan dengan mengandalkan kemampuan dan kesehatan sendiri.

Berdasarkan sasaran visi dan misi, maka Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat telah mampu mencapai sasaran kerjanya, antara lain: (1) meningkatnya komitmen dan kemampuan Kabupaten/Kota untuk mencapai desa siaga sehat, (2) menjamin setiap orang miskin mendapatkan pelayanan kesehatan dasar atau rujukan spesialisasi yang bermutu, (3) meningkatnya perlindungan pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, anak dan masyarakat resiko tinggi, (4) meningkatnya keluarga sadar gizi, (5) meningkatnya penggunaan obat-obat yang rasional dan pemahaman obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta di setiap jenjang, (6) meningkatnya pengawasan dan pengendalian peredaran kesediaan makanan dan kesediaan perbekalan farmasi terutama napza, narkoba dan atra, (7) tertanggulangnya masalah kesehatan pada saat dan pasca bencana dan antisipasi *global warming*, (8) meningkatnya derajat kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui aktivitas fisik dan olahraga yang baik, benar, teratur dan terukur.

Berdasarkan uraian di atas, makna dari pelaksanaan profesionalisme birokrasi tidak menunjukkan bahwa profesionalisme birokrasi memiliki peran penting bagi peningkatan kinerja pegawai. keberhasilan ini memberi pengaruh bagi keberhasilan organisasi secara keseluruhan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara penuh. Dengan demikian, secara simultan pengaruh profesionalisme

birokrasi terhadap kinerja pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang valid dan potensial untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

2) Pengaruh Variabel Lain di luar Variabel yang Dikaji

Selain variabel yang dikaji di muka, banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai untuk dipelajari dan dibahas lebih lanjut di kemudian hari untuk memperkuat dan memperkokoh teori-teori yang telah dibahas dan dikembangkan dalam penelitian ini, pengaruh variabel lain tersebut sebesar 52,52%.

Variabel lain yang berpengaruh ini mengingatkan bahwa variabel luar sama pentingnya dengan variabel yang telah dibahas dalam penelitian ini. Untuk itu variabel luar ini dapat dijadikan studi lanjutan dalam penelitian mendatang agar dapat menemukan hasil penelitian lebih luas dan bermanfaat dilihat dari berbagai variabel yang multivarian.

3) Pembahasan Pengaruh Parsial Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Secara parsial pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai yang terdiri dari 3 aspek profesionalisme birokrasi yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan aspek ketaatan pada kode etik, dibahas masing-masing pada paragraf di berikut ini.

a. Pembahasan Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan (X_1) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang negatif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 8,49%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Pengetahuan belum memberikan makna cukup penting pada peningkatan kinerja pegawai Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Rendahnya pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap Kinerja Pegawai ini ditunjukkan oleh kurangnya pemahaman dan penguasaan dengan baik dan jelas mengenai peraturan pelayanan dan kurangnya kemampuan untuk memberikan penjelasan pada pihak yang membutuhkan, sehingga kurang mendukung terhadap kinerja pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator, yang terdiri dari indikator Memahami peraturan kerja, Memahami bidang kerja dan Mampu memberikan penjelasan. Pengaruh Aspek Pengetahuan terhadap kinerja pegawai melalui indikator Memahami peraturan kerja belum dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai kurang memahami peraturan yang baik. Melalui indikator Memahami bidang kerja belum dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai belum memahami bidang kerja yang harus dijalankan. Melalui indikator Mampu memberikan penjelasan, belum

dijalankan sepenuhnya, karena para pegawai kurang mampu memberikan penjelasan tentang peraturan.

Analisis di atas, menurut Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Memahami peraturan kerja secara keseluruhan para pegawai kurang memahami peraturan kerja dengan sepenuhnya. Kedua, indikator Memahami bidang kerja, para pegawai kurang jujur dan kurang memahami bidang kerja yang menjadi tugasnya. Ketiga, indikator Mampu memberikan penjelasan, para pegawai secara umum kurang mampu memberikan penjelasan tentang aturan dan tugasnya. Walaupun menurut pendapat para responden Aspek Pengetahuan ini negatif, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Aspek Pengetahuan ini telah diupayakan untuk meningkatkan pengetahuan kerja di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

b. Pembahasan Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan Menggunakan Peralatan (X_2) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Keterampilan terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 11,57%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Keterampilan telah memberi makna yang cukup penting pada Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Besarnya pengaruh Aspek Keterampilan terhadap Kinerja Pegawai ini berkaitan dengan kehandalan

menggunakan peralatan kantor, menguasai sistem dan prosedur serta memahami kebutuhan publik. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek Keterampilan untuk Profesionalisme Birokrasi telah dijalankan sepenuhnya oleh pegawai karena para pegawai memiliki kehandalan, menguasai sistem dan prosedur untuk kebutuhan pelayanan pada masyarakat, sehingga mendukung kinerja pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Aspek Keterampilan terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari indikator Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi keinginan publik. Pengaruh Aspek Keterampilan terhadap kinerja pegawai melalui indikator Terampil menggunakan peralatan, pada dasarnya para pegawai telah memiliki keterampilan menggunakan peralatan kantor. Melalui indikator Mengerti prosedur kerja, para pegawai secara umum telah memahami prosedur kerja. Melalui indikator Memenuhi keinginan publik, para pegawai telah bekerja sesuai dengan tuntutan publik dalam melaksanakan tugas.

Analisis di atas, menurut Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator Terampil menggunakan peralatan, Mengerti prosedur kerja dan Memenuhi keinginan publik, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Terampil menggunakan peralatan telah dilaksanakan oleh para pegawai dengan penuh tanggungjawab terhadap

pekerjaan yang dihadapinya. Kedua, indikator Mengerti prosedur kerja para pegawai telah memahami dengan sesungguhnya prosedur kerja dalam tugasnya. Ketiga, indikator Memenuhi keinginan publik, para pegawai telah bekerja dengan penuh kesungguhan sesuai dengan keinginan publik. Hasil wawancara ini telah sesuai dengan pendapat responden yang menunjukkan bahwa Aspek Keterampilan telah dimiliki oleh pegawai meliputi terampil menggunakan peralatan, mengerti prosedur kerja dan memenuhi keinginan publik.

c. Pembahasan Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan Kode Etik (X₃) terhadap Kinerja Pegawai (Y)

Pengaruh Profesionalisme Birokrasi melalui Aspek Ketaatan kode etik terhadap Kinerja Pegawai menunjukkan pengaruh yang positif berdasarkan hitungan statistik dengan besaran angka 27,43%. Hal ini menunjukkan bahwa Aspek Ketaatan kode etik telah memberikan makna penting terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tingginya pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap Kinerja Pegawai ditunjukkan oleh sikap adanya rasa tanggungjawab pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Melihat hasil penelitian di atas, tampak bahwa Aspek Ketaatan kode etik untuk Profesionalisme Birokrasi telah dijalankan oleh pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Aspek Ketaatan kode etik

terhadap kinerja pegawai dapat dianalisis melalui masing-masing indikator yang terdiri dari indikator Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra organisasi. Pengaruh Aspek Ketaatan kode etik terhadap kinerja pegawai melalui indikator Memiliki rasa tanggungjawab, para pegawai telah menunjukkan diri dengan sikap tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang menjadi tugasnya. Melalui indikator Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya. Melalui indikator Menjaga citra organisasi, dalam melaksanakan tugasnya para pegawai telah bekerja dengan tepat waktu dan mutu yang tinggi untuk menjaga citra organisasi.

Analisis di atas, menurut Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari indikator Memiliki rasa tanggungjawab, Bekerja sesuai aturan serta Menjaga citra organisasi, dapat dinyatakan bahwa: Pertama, indikator Memiliki rasa tanggungjawab secara umum para pegawai telah memiliki rasa tanggungjawab yang ditunjukkan dengan dedikasi kerja yang baik. Kedua, indikator Bekerja sesuai aturan, para pegawai telah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan tersebut. Ketiga, indikator Menjaga citra organisasi, secara umum pegawai telah menjaga citra organisasi dari masyarakat dengan cara memberikan pelayanan dengan sepenuhnya. Hasil wawancara ini telah sesuai dengan pendapat responden yang menunjukkan bahwa Aspek Ketaatan kode etik telah dijalankan dengan penuh

rasa tanggungjawab sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditunjukkan dengan cara memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai tugasnya.

9. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Profesionalisme Birokrasi terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dapat disimpulkan hasil-hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Secara simultan variabel Profesionalisme Birokrasi telah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pegawai pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini variabel Profesionalisme Birokrasi ini merupakan variabel yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai dan dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada variabel lain yang cukup berpengaruh untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- 2) Secara parsial Aspek-aspek Profesionalisme Birokrasi yang terdiri dari aspek Pengetahuan, aspek Keterampilan dan aspek Ketaatan kode etik berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Namun hasil penelitian menunjukkan adanya variasi nilai yang tidak sama diantara aspek-

aspek tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu aspek Profesionalisme Birokrasi yang menunjukkan pengaruh tidak positif terhadap Kinerja Pegawai yaitu: aspek Pengetahuan. Aspek ini belum memberikan makna positif bagi peningkatan Kinerja Pegawai, karena pengetahuan pegawai yang berkaitan dengan pemahaman aturan perlu ditingkatkan karena keterbatasan keahlian. Sedangkan dua aspek lainnya yaitu: aspek Keterampilan dan aspek Ketaatan kode etik telah menunjukkan pengaruh positif, karena para pegawai telah memiliki keterampilan kerja dengan tepat dan memiliki kode etik sesuai dengan tradisi yang ada di lingkungan kerja.

10. Saran-saran

Setelah disimpulkan hasil penelitian ini, selanjutnya disampaikan saran-saran peneliti sebagai kontribusi hasil penelitian untuk meningkatkan Kinerja Pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Profesionalisme Birokrasi dan Kinerja Pegawai, terutama yang terkait dengan variabel-variabel di luar variabel Profesionalisme Birokrasi.
- 2) Penelitian lanjutan diharapkan dapat mendukung hasil-hasil penelitian ini untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu administrasi publik di masa mendatang.
- 3) Sebaiknya dilakukan usaha-usaha pemecahan masalah untuk meningkatkan aspek Pengetahuan, karena aspek ini belum dapat dijalankan dengan sepenuhnya oleh pegawai, sehingga aspek ini perlu mendapat perhatian Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, melalui pelaksanaan aturan-aturan kerja yang berlaku.
- 4) Diusahakan dilakukan upaya-upaya perbaikan peningkatan Profesionalisme Birokrasi bagi peningkatan keterampilan serta ketaatan kode etik dalam meningkatkan kinerja pegawai di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- 5) Sebaiknya ditugaskan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan pemahaman Profesionalisme Birokrasi dengan mengikuti studi lanjut atau mengikuti seminar dan sebagainya agar dapat mendukung kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan tugas.
- 6) Guna pencapaian hasil kerja yang maksimal, sebaiknya Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memiliki pedoman kerja tersendiri yang berkaitan dengan teknis dan metode penerapan Profesionalisme Birokrasi di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bagi peningkatan kinerja pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Rasid, Harun. 1994. *Analisis Jalur (Path Analysis) Sebagai Sarana Statistika Dalam Analisis Kausal*. Bandung: LP3ES Fakultas Ekonomi UNPAD.
- Harits, Benyamin. 2002. *Paradigma Baru Dimensi-dimensi Prima Administrator Publik*. Bandung: Insani Press.
- _____. 2006. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Birokrasi Publik Berbasis Kinerja dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar. 2004. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sobandi, Baban. 2002. *Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: Mutiara Ilmu.
- Widodo, Joko. 2005. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Prof. Dr. H. Benyamin Harits, M.Si.
Dosen Program Magister Ilmu Administrasi
pada Fakultas Pascasarjana Unpas